

# **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



## **RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024 - 2026**

**TAHUN 2023**

3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.

#### **B. Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
3. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
4. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
5. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
6. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
7. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
8. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
9. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
10. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
12. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
13. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;

internasional; (5) Branding pengembangan SDM PUPR untuk komunikasi publik dan menarik talenta, dan (6) Pengembangan BPSDM sebagai LSP.

h. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi Continous Audit Continous Monitoring (CACM); (3) Mendorong efektivitas unit kepatuhan internal; (4) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas; (5) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan roadmap RB tahun 2020-2024; (6) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (7) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; (8) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.

i. Arah Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: (1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); (2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; (3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; (4) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel; (5)

Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); (6) Peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; (7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; (8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

### **3.4. Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadikan Kabupaten Bandung Barat memiliki daya tarik yang besar baik sebagai tujuan investasi, tujuan pariwisata maupun pengembangan dan peningkatan produksi pertanian dan peternakan, serta industri, dimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah menyangkut masalah penyediaan infrastruktur dasar dan penataan kewilayahan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi, RPD

dan renstra dinas, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian, diantaranya adalah :

1. Isu strategis secara makro/umum, yaitu :
  - a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Peningkatan aksesibilitas baik antar wilayah dalam kabupaten Bandung Barat maupun keluar daerah;
  - d. Pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko dampak bencana;
  - e. Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik;

pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.

- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, guna melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.

c. Isu Strategis Bidang PLP dan Air Minum, meliputi ;

- Kebutuhan sarana prasarana air minum di beberapa lokasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat, selain terdapat sumber air (intake) yang belum dikelola/dimanfaatkan secara optimal, pada daerah tertentu merupakan kawasan rawan kekeringan yang perlu penanganan dan diperhatikan;
- Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut;
- Kurangnya sistem yang digunakan berupa jaringan perpipaan dengan mengandalkan sistem mata air gravitasi pada lokasi-lokasi tertentu, selain itu di beberapa lokasi perlu menambah mesin pompa untuk mengambil air minum untuk didistribusikan ke warga masyarakat;

**Tabel 4.1.** Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun			Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Prevalensi Stunting	17%	17%	17%	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik layak	Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	83,42%	83,92%	84,42%
						Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan layak dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	66,26%	66,76%	67,26%
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	12,89%	13%	13%	Meningkatnya Jumlah Lahan Pertanian yang terairi oleh infrastruktur SDA	Persentase lahan pertanian terairi oleh infrastruktur SDA	60,51%	60,77%	61,04%
Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	66,72%	79,69%	92,56%	Meningkatnya Keter-sediaan Infrastruktur di Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan	Persentase infrastruktur terbangun di Kawasan Permukiman	100%	100%	100%
						Persentase drainase terbangun di kawasan permukiman	66,89%	68,76%	70,26%